



**PUTUSAN**  
**Nomor 597/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2959/PJ/2014 tanggal 3 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

**melawan:**

**PT. CERENTI SUBUR**, tempat kedudukan di Jalan OKM Jamil Nomor 1, RT.02/01, Kota Pekanbaru, Riau, d/h Menara Palma Lantai 27, HR. Rasuna Said X-2, Kavling 6, Jakarta;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54373/PP/M.XA/99/2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Latar Belakang Penerbitan Pajak S-00026/WPJ.02/KP.1003/2014;

1. Pada tanggal 7 Oktober 2013, Tergugat (dalam hal ini KPP Madya Pekanbaru) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Nomor: 00184/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp197.577.870,00, yang terdiri dari Pajak yang kurang di bayar sebesar Rp138.097.796,00, Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp56.930.074,00 dan Sanksi Bunga Pasal 13 (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp2.550.000,00;

2. Sehubungan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 000184/207/11/218/13 tersebut, pada tanggal 16 Januari 2014, Penggugat mengajukan Surat Nomor: 012/CSB-KBRT-PPN/I/2014 mengenai Permohonan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 000184/207/11/218/13 dengan merujuk kepada Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Menjawab Permohonan Permohonan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 000184/207/11/218/13 yang diajukan, pada tanggal 24 Januari 2014, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S-00026/WPJ.02/KP.1003/2014 yang isinya memberitahukan Permohonan Keberatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
4. Sehubungan dengan penerbitan S-00026/WPJ.02/KP.1003/2014 tersebut, maka pihak KPP menyatakan bahwa surat Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 4 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bukan merupakan merupakan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Pokok Sengketa — Penggugat Tidak Setuju atas pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa keberatan tidak memenuhi persyaratan formal;

Bahwa dalam S-00026/WPJ.02/KP.1003/2014 pihak Tergugat menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang KUP yang mengatakan “Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya”;

Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan gugatan ini adalah bahwa Penggugat tidak setuju dengan

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Penggugat mengajukan permohonan Keberatan masih dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga keberatan Penggugat dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa penjelasan yang lebih rinci mengenai pendapat dan alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dijelaskan pada Alasan Material Gugatan Yang Diajukan Penggugat;

Ketentuan Formal Gugatan;

Bahwa merujuk kepada Pasal 23 (2) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 40 dan 41 Undang-undang Pengadilan Pajak, dengan ini Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan formal gugatan yaitu:

1. Mengajukan gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
2. Bahwa surat gugatan ini diajukan atas Surat Tergugat Nomor: S-00026/WPJ.02/ KP.1003/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;
3. Bahwa surat gugatan ini disampaikan sebelum batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keputusan Tergugat Nomor: S-00026/WPJ.02/KP.1003/2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Februari 2014;

Alasan Material Gugatan Yang Diajukan Penggugat;

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan di atas, hal yang menjadi Pokok Sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak setuju dengan Tergugat karena Penggugat mengajukan permohonan keberatan masih dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga keberatan Penggugat dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa berikut ini adalah penjelasan atas dasar koreksi yang dilakukan oleh Tergugat dan tanggapan serta penjelasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat;

1. Alasan Penolakan permohonan Keberatan oleh Tergugat:

Bahwa menurut Tergugat, batas waktu penyampaian keberatan adalah 3 Bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak yang mana sesuai dengan tanggal SKP diterbitkan yaitu tanggal 7 Oktober 2013 sehingga batas akhir penyampaian keberatan menurut Tergugat adalah tanggal 6 Januari 2014;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Tanggapan dan Penjelasan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju atas pendapat Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

### a. Penggugat baru menerima surat dari Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013;

Bahwa menurut Penggugat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan baru diterima pada tanggal 23 Oktober 2013 dan hal ini dapat diperkuat dengan bukti penerimaan surat dan tracking yang dapat dilihat dari pihak penyedia jasa kurir yang digunakan oleh Tergugat dalam mengirimkan SKPLB tersebut;

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatakan "Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya";

Bahwa definisi Tanggal dikirim dan Tanggal diterima dalam Pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak mungkin surat keberatan yang dikirim pada tanggal 7 Oktober 2013 diterima secara resmi Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2013, karena surat tersebut dikirim masih dalam satu wilayah yang sama yaitu Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan data di atas, maka menurut Penggugat tanggal dikirim adalah tanggal 23 Oktober 2013 sehingga batas waktu 3 bulan penyampaian keberatan adalah paling lama tanggal 22 Januari 2014;

### b. Surat Keberatan disampaikan Penggugat pada tanggal 11 Januari 2014

Bahwa perlu Penggugat informasikan bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Penggugat telah menyampaikan surat banding melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Penggugat menyatakan

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat Keberatan Penggugat masih dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54373/PP/M.XA/99/2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan membatalkan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-00026/WPJ.02/KP.1003/2014 tanggal 24 Januari 2014, Perihal Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, atas nama PT. Cerenti Subur, NPWP: 01.062.194.4-218.000, alamat di Jalan OKM Jamil Nomor 1, RT.02/01, Kota Pekanbaru, Riau, d/h Menara Palma Lt.27, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2, Kav.6, Jakarta:

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54373/PP/M.XA/99/2014, tanggal 18 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2959/PJ/2014 tanggal 3 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 November 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sesuai dengan Surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor TKM-3577/PAN.Wk/2016 tanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54373/PP/M.XA/99/2014 tanggal 18 Agustus 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* antara lain menyatakan sebagai berikut:

Halaman 21 dan 22:

Bahwa Majelis berpendapat, Pos pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 *a quo* adalah meliputi Kantor Pos dan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang digunakan untuk pengiriman surat/dokumen;

Bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan bukti hasil tracking atas *Air Way Bill* (AWB) Nomor 2 362921 730008, Tergugat mengirimkan SKPKB PPN Nomor 00184/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Desember 2011 kepada penggugat melalui jasa PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada tanggal 9 Oktober 2013 (*Date of Shipment*);

Bahwa Majelis berpendapat tanggal diterima SKPKB PPN Nomor 00184/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Desember 2011 oleh penggugat melalui jasa PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada tanggal 23 Oktober 2013 (*Date of Delivery*);

Bahwa Majelis berpendapat, terdapat perbedaan waktu yaitu selama 14 (empat belas) hari antara *date of shipment* oleh Tergugat kepada PT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan *date of delivery* (tanggal pengiriman) oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir kepada Penggugat,

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017



padahal pengiriman dilakukan masih dalam satu wilayah kota, yaitu kota Pekanbaru;

Bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPN Nomor: 00184/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Desember 2011 oleh Penggugat adalah terkait kinerja PT. Jalur Nugraha Ekakurir (sebagai jasa/pos pengiriman yang digunakan oleh Tergugat) merupakan sesuatu keadaan di luar kekuasaan Penggugat dan bukan merupakan kesalahan Penggugat;

Bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPN Nomor 00184/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Desember 2011 oleh Penggugat tersebut merupakan keadaan di luar kekuasaan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang KUP;

Bahwa Majelis berpendapat, tanggal 23 Oktober 2013 yang merupakan date of delivery oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) kepada Penggugat merupakan tanggal terima oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Majelis berpendapat, Surat Keberatan Penggugat nomor: 012/CSB-KBRT-PPN/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014, masih memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang KUP;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon pertimbangan Majelis Hakim untuk:

1. Membatalkan Surat Tergugat Nomor: S-00026/WPJ.02/KP. 1003/2014 karena berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa surat Keberatan Penggugat masih dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Meneruskan proses keberatan Penggugat sesuai surat Penggugat Nomor: 012/CSB-KBRT-PPN/I/2014 mengenai Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor: 00184/207/11/218/13 yang sebelumnya tidak diproses oleh Tergugat;

Bahwa dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang diatur:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis di atas, Majelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Surat Tergugat Nomor S-00026/WPJ.02/KP.1003/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, tidak dapat dipertahankan dan Tergugat agar menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis mengabulkan gugatan penggugat dan selanjutnya agar Tergugat melanjutkan proses keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 7:

“Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

Pasal 1 angka 12:

“Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

Pasal 40 ayat (1):

“Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”;

Pasal 40 ayat (2):

“Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sejak tanggal pelaksanaan penagihan”;

Pasal 40 ayat (3):

”Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat”;

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak, dan/atau;
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

”Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

”Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku;

2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009



(selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), yang antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 36:

"Putusan gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hai yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan";

Pasal 1 angka 40:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

Pasal 23 ayat (2):

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak";

Pasal 25 ayat (3):

"Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya";

Pasal 25 ayat (4):

"Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;



- 2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, (selanjutnya disebut PP 74) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

"Keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

- a) surat ketetapan pajak dikirim; atau
- b) pemotongan atau pemungutan pajak;

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya";

Pasal 28 ayat (2):

"Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) bencana alam;
- b) kebakaran;
- c) huru-hara/kerusuhan massal;
- d) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau
- e) keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak";

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54373/PP/M.XA/99/2014 tanggal 18 Agustus 2014serta berdasarkan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan uraian penjelasansebagai berikut:

- 3.1. Bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan oleh para pihak dalam persidangan antara lain adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.1. Dokumen dari KPP Madya Pekanbaru berupa Invoice dan tanda terima kiriman SKP melalui PT JNE – *Air Way Bill* Number 2362 921730008 yang ditujukan kepada PT. Cerenti Subur tertanggal 9 Oktober 2013;
- 3.1.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berdasarkan tracking dokumen pengiriman SKP diterima oleh Pemohon Banding tanggal 23 Oktober 2013;
- 3.1.3. Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2011 Nomor: 00184/207/11/218/13 melalui surat Nomor: 012/CSB-KBRT-PPN/I/2014 tanggal 06 Januari 2014. Surat keberatan tersebut dikirim melalui PT. Trimuda Nuansa Citra (GED) pada tanggal 16 Januari 2014 dengan nomor resi pengiriman 11779916 dan diterima KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2014. KPP Madya Pekanbaru mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)/Lembar Arus Pengawasan Dokumen (LPAD) dengan Nomor: PEM:01000274/218/jan/2014 tanggal 20 Januari 2014. Sesuai BPS/LPAD, tanggal terima adalah 16 Januari 2014;
- 3.2. Bahwa sengketa adalah terkait dengan pemenuhan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP yang mengatur sebagai berikut: “Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya”;
- 3.3. Bahwa nyata-nyata berdasarkan bukti di atas tanggal dikirim SKP adaah tanggal 9 Oktober 2013 dengan demikian batas waktu pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah tanggal 8 Januari 2014;
- 3.4. Bahwa nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berdasarkan Bukti Penerimaan Surat (BPS)/Lembar Arus Pengawasan Dokumen (LPAD) dengan Nomor: PEM:01000274/218/jan/2014 tanggal 20 Januari 2014. Sesuai

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017



BPS/LPAD, tanggal terima surat keberatan adalah 16 Januari 2014;

- 3.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya mendasarkan pendapatnya pada pengertiantanggal dikirim sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 40 Undang-Undang KUP dan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 40 Undang-Undang KUP, "Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, "Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

- 3.6. Bahwa dalam pendapatnya Majelis mengemukakan sebagai berikut:

"Bahwa Majelis berpendapat, Pos pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 *a quo* adalah meliputi Kantor Pos dan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang digunakan untuk pengiriman surat/dokumen";

- 3.7. Bahwa terkait dengan definisi pos pengiriman, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tersebut yaitu meliputi Kantor Pos dan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang digunakan untuk pengiriman surat/dokumen, namun demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak sependapat dengan pendapat Majelis yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPN Nomor: 00184/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Desember 2011 oleh Penggugat adalah terkait kinerja PT. Jalur Nugraha Ekakurir (sebagai jasa/pos pengiriman yang digunakan oleh Tergugat) merupakan sesuatu keadaan di luar

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017





kekuasaan Penggugat dan bukan merupakan kesalahan Penggugat;

Bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPN Nomor 00184/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Desember 2011 oleh Penggugat tersebut merupakan keadaan di luar kekuasaan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang KUP;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Keadaan Di luar Kekuasaan Wajib Pajak (*Force Majeur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) beserta penjelasannya, adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perpajakan sebagai berikut:

3.7.1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, yang menyatakan:

Pasal 28 ayat (1):

"Keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

- a) surat ketetapan pajak dikirim; atau
- b) pemotongan atau pemungutan pajak;

Pasal 28 ayat (2):

"Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Bencana alam;
- b) Kebakaran;
- c) Huru-hara/kerusuhan massal;
- d) Diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau
- e) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak";

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017



3.7.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, yang menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf e:

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

- 1) surat ketetapan pajak dikirim; atau
- 2) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga;

kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;

Pasal 5 ayat (1):

Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. huru-hara/kerusakan massal;
- d. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;

3.7.3. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) kondisi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan dalam persidangan gugatan ini tidak termasuk dalam kondisi keadaan di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) (*force majeure*), sehingga kesimpulan Majelis Hakim telah keliru;

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017



3.7.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat, pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat keberatan Penggugat Nomor 012/CSB-KBRT-PPN/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014, masih memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang KUP, adalah sebuah pendapat yang keliru karena faktanya pendapat tersebut tidak berdasarkan atas Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) surat keberatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP, dan surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-00026/WPJ.02/KP.1003/2014 Tanggal 24 Januari 2014, telah benar karena dikeluarkan berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

3.8. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berkesimpulan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak, dan/atau;
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

3.9. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mengabaikan fakta sebagaimana tercantum dalam angka 1 di atas, dan kesimpulan Majelis Hakim tanpa didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan dan fakta-fakta yang terungkap dalam bukti-bukti;

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sudah diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), dengan demikian putusan yang diambil menjadi tidak tepat karena ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat 1 huruf f Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;

3.10. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Surat Nomor S-00026/WPJ.02/KP.1003/2014 Tanggal 24 Januari 2014 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak karena Keyakinan Hakim tidak sesuai

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017



dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54373/PP/M.XA/99/2014 tanggal 18 Agustus 2014 harus dibatalkan;

- II. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.54373/PP/M.XA/99/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-00026/WPJ.02/KP.1003/2014 tanggal 24 Januari 2014, Perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, atas nama: PT. Cerenti Subur, NPWP: 01.062.194.4-218.000, alamat di Jalan OKM Jamil Nomor 1, RT.02/01, Kota Pekanbaru, Riau, d/h Menara Palma Lt.27, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2, Kav 6, Jakarta;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor S-00026/WPJ.02/KP.1003/2014 tanggal 24 Januari 2014, mengenai Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, atas nama Penggugat, NPWP 01.062.194.4-218.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dibatalkannya Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-00026/WPJ.02/KP.1003/2014 tanggal 24 Januari 2014, perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* majelis berpendapat dan terbukti hasil *tracking* atas *Air Way Bill* (AWB) Nomor 2 362921 730008 melalui Jasa PT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan *date of delivery* ditentukan pada tanggal 23 Oktober 2013 dapat dibenarkan, sehingga keberatan Penggugat, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) *juncto* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :  
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H.Yulius, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. Ashadi, SH.**  
NIP. : 19540827 198303 1 002